

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman era globalisasi, reformasi, dan tuntutan transparansi yang semakin meningkat ini, peran akuntansi kini semakin dibutuhkan dan termasuk didalamnya sektor pemerintahan. Akuntansi pemerintahan merupakan bagian dari disiplin ilmu akuntansi. Atas tuntutan perekonomian, sekarang ini akuntansi pemerintahan menjadi sangat penting. Karena semakin besar dana yang dikelola pemerintah, semakin besar pula tuntutan akuntabilitas keuangan yang semakin baik. Menurut Yendrawati (2013) menyatakan bahwa akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Media pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah adalah laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan yang telah dilakukan pemerintah pusat maupun daerah apakah sudah dijalankan dengan baik dan digunakan untuk mengambil keputusan pada pemangku kepentingan. Sehingga laporan keuangan tidak boleh berisi informasi yang menyesatkan karena dapat mengakibatkan kesalahan dalam mengambil suatu keputusan,

sehingga laporan keuangan yang disajikan harus berkualitas. Laporan keuangan yang berkualitas adalah yang telah memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan.

Apabila informasi yang terdapat dalam Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang syaratkan dalam PP No. 24/2005 dan revisi PP No. 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yakni relevan, andal, dapat dibandingkan serta dapat dipahami, berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang berkualitas menunjukkan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPD) selaku pejabat yang bertanggungjawab sesuai dengan wewenang yang telah dilimpahkan kepadanya sehubungan dengan integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang tercermin dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) (Kuasa, 2016).

Ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang diteliti dalam penelitian ini adalah penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi dan komitmen organisasi.

Faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang pertama adalah penerapan standar akuntansi pemerintah. Menurut Ramadhan (2015) menyatakan bahwa lahirnya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) telah membuat perubahan hebat terhadap pola pengelolaan keuangan pemerintah di

Indonesia. Standar tersebut dikukuhkan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut menggunakan basis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas dana. Sekarang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah No .71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menggunakan basis kas, kas menuju akrual (*cash towards accrual*) sampai basis akrual. Sehingga dengan adanya penerapan standar akuntansi pemerintah yang baik maka akan menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.

Faktor kedua yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah kompetensi sumber daya manusia. Menurut Yosefrinaldi (2013) menyatakan bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Kemampuan sumber daya manusia dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dapat dirancang melalui suatu sistem pengendalian internal dengan tujuan umumnya adalah efisiensi dan efektivitas operasi. Pengendalian internal dalam organisasi akan mendorong pemakaian sumber daya secara efisien dan efektif untuk mengoptimalkan sasaran-sasaran organisasi. Aspek yang paling penting dari pengendalian internal adalah personel. Jika karyawan adalah orang yang

kom-peten dan bisa dipercaya, pengendalian lain bisa tidak ada dan laporan keuangan yang bisa diandal-kan masih bisa dihasilkan.

Faktor ketiga yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah penerapan sistem pengendalian intern pemerintah. Sistem pengendalian intern pemerintah, selanjutnya disebut SPIP, adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. SPIP bisa dijadikan indikator awal dalam menilai kinerja suatu entitas. SPIP merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya suatu organisasi, dan juga memiliki peran penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (*fraud*) secara dini. SPIP akan membantu memandu entitas berjalan bagaimana semestinya. Salah satu tujuan umum manajemen dalam merancang sistem pengendalian internal yang efektif adalah agar pelaporan keuangan reliabel (Arens, 2008:370) dalam (Yosefrinaldi, 2013)

Faktor keempat yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah pemanfaatan teknologi informasi. Menurut Yosefrinaldi (2013) menyatakan bahwa penggunaan teknologi informasi juga mempunyai andil yang besar untuk mencapai laporan keuangan yang berkualitas. Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (*hardware* dan *software*) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi informasi merupakan alat yang bisa melipatgandakan kemampuan yang dimiliki manusia dan

komputer juga bisa mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya. Penggunaan teknologi informasi oleh entitas dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari pengendalian internal dengan secara konsisten memproses sejumlah besar volume transaksi data. Teknologi informasi juga meningkatkan ketepatan waktu dan akurasi dari informasi. Peningkatan ke pengendalian internal sebagai hasil pengintegrasian teknologi informasi ke dalam sistem akuntansi yaitu kendali komputer menggantikan kendali manual.

Faktor kelima yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah komitmen organisasi. Menurut Ramadan (2015) menyatakan bahwa komitmen organisasi akan mempertahankan kepatuhan dalam penyajian laporan keuangan pemerintah yang reliable sesuai dengan SAP. komitmen organisasi mengandung pengertian sebagai suatu hal yang lebih dari sekedar kesetiaan yang pasif terhadap organisasi, dengan kata lain komitmen organisasi menyiratkan hubungan karyawan dengan organisasi secara aktif karena karyawan yang menunjukkan komitmen tinggi memiliki keinginan untuk memberikan tenaga dan tanggung jawab yang lebih dalam kesejahteraan dan keberhasilan organisasi tempatnya bekerja.

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yuliani dan Rahmawati (2016) dengan mengganti satu variabel independen yaitu variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Kemudian menggantinya dengan variabel independen yaitu variabel Komitmen Organisasi. Dengan komitmen keberpihakan anggota organisasi terhadap organisasinya serta terlibat aktif dan berkontribusi dalam organisasinya.

Dengan komitmen yang tinggi akan menimbulkan rasa memiliki, sehingga ada keterkaitan antara anggota dengan organisasinya (Widari dan Sutrisno, 2017). Sedangkan variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dalam penelitian Yuliani dan Rahmawati (2016) tidak mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga dalam penelitian ini tidak digunakan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengajukan penelitian dengan judul “PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris Pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Boyolali).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas maka peneliti menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?.
2. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?.
3. Apakah penerapan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?.

4. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?.
5. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang diuraikan tersebut maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh penerapan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
4. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
5. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi instansi terkait Dapat mengetahui seberapa pentingkah kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi, dan pengendalian internakuntansi terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuanganPemerintah Daerah.
2. Bagi pihak eksekutif sebagai pengguna dan sekaligus sebagai penyaji pelaporan keuangan pemerintah Mendorong agar lebih menyadari pentingnya penyajian pelaporan keuangansecara lengkap dan pemberian kemudahan kepada penggunanya untuk mengakses pelaporan keuangan tersebut. Penyajian pelaporan keuangan bukan semata-mata untuk memenuhi kewajiban yang digariskan oleh peraturan perundangan yangberlaku, tetapi juga harus disadari bahwa penyajian pelaporan keuangan tersebut harus andal dan tepat waktu karena dibutuhkan sebagai sarana akuntabilitas keuangan kepada pengguna serta untuk pengambilan keputusan
3. Bagi Komite Standar Akuntansi PemerintahSebagai bahan pertimbangan Komite Standar Akuntansi Pemerintah dalam menyempurnakan Standar Akuntansi Pemerintah khususnya PernyataanStandar Akuntansi Pemerintah No. 1 tentang Penyajian pelaporan Keuangan.
4. Bagi akademisi Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wacana dan literatur penelitianakuntansi dan pemanfaatan pelaporan keuangan pemerintah daerah yang andal dan tepat waktu.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan dari penelitian ini dibagi ke dalam lima bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menguraikan tentang tinjauan pustaka yang membahas mengenai konsep relevan yang mendukung dalam penelitian ini, antarlain: penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, kerangka pemikiran, dan perumusan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas jenis penelitian, populasi sampel, dan teknik pengambilan sampel, data dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional variabel, metode pengujian instrumen, serta teknikanalisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Merupakan bagian pembahasan, yang berisi tentang pengujian atashipotesis yang dibuat dan penyajian dari hasil pengujian tersebut dan analisis data. Pada bab ini akan disajikan dan dijelaskan tentang

hasil pengumpulan, analisis data, dan sekaligus merupakan jawaban atas hipotesis yang telah dikemukakan.

BAB V PENUTUP

Mengemukakan simpulan yang diperoleh, keterbatasan penelitian, sertasaran untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut.